



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI X DPR RI DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISTEK DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari / Tanggal	: Kamis, 13 Juni 2024
Waktu	: 11.45 WIB s.d 13.08 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gd. Nusantara I Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Ketua Rapat	: Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Acara	: Membahas RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2025
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP, M.H. Kabag Set. Komisi X DPR RI
Hadir	: A. ANGGOTA DPR RI PIMPINAN: 1. H. Syaiful Huda (Ketua / F-PKB) 2. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S, M.M (Wakil Ketua / F-PDI Perjuangan) 3. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP (Wakil Ketua / F-GOLKAR) 4. Dr. Dede Yusuf M E, S.T, M.I.Pol (Wakil Ketua / F-DEMOKRAT) 5. Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M (Wakil Ketua (F-PKS)

FRAKSI PDI PERJUANGAN (F-PDIP):

1. Putra Nababan
2. Rano Karno, S.IP
3. Dr. Andreas Hugo Pareira
4. Dra. Adriana Charlotte Dondokambey,
M.Si
5. Dr. Hj. Rosiyati MH Thamrin, S.E, M.M,
M.H.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-GOLKAR):

1. Ferdiansyah, S.E.,M.M.
2. Dr. H.A. Mujib Rohmat, M.H
3. Robert Jopyy Kardinal, SAB

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA):

1. Ir. H. Nuroji
2. Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si.

FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM):

1. Ratih Megasari Singkaru, M.Si.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB):

1. Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H, M.H.
2. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-DEMOKRAT):

1. Bramantyo Suwondo M, M.IR
2. Anita Jacoba Gah, S.E.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS):

1. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T.
2. Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M, M.Ed.
3. H. Mustafa Kamal, S.S.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN):

- 1.-

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E.

B. PEMERINTAH/TAMU UNDANGAN

1. Nadiem Anwar Makarim, B.A, M.B.A. (Mendikbudristek RI)
2. Ir. Suharti, M.A, Ph.D (Sekretaris Jenderal)
3. Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H, S.E, M.H (Inspektur Jenderal)
4. Dr. Iwan Syahril, Ph. D (Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

Anggota kita mulai.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang kita banggakan bersama, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim beserta seluruh jajaran, Ada Ibu Sekjen, Ibu Dirjen, Kepala Badan semua yang hadir, Termasuk Kepala Pusat Pembiayaan,

Waduh yang sebentar lagi pensiun ini, Bu. Kita kehilangan sekali atas kinerja beliau yang luar biasa selama ini.

Para Pimpinan Komisi yang saya hormati saya banggakan, Anggota Komisi yang saya hormati saya banggakan,

Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan rapat kerja setelah tadi kita bersama dengan Prof. Amin, selaku PLT Perpusnas RI, membahas hal yang sama terkait dengan RKA dan RKP Perpusnas RI. Semoga limpahan kesehatan selalu menyertai kita semua.

Menurut catatan Sekretariat, telah hadir 9 fraksi dari 9 fraksi, sudah kuorum sebagaimana mandat amanat Pasal 281 ayat (1).

Kepada mahasiswa magang, terima kasih ini detik-detik terakhir teman-teman. Semoga sudah menambah banyak *best practice* politik, pelembagaan politik di DPR dari berbagai sektor termasuk di Komisi X yaitu Pendidikan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga.

Dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim*, saya buka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.45 WIB)

**Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Mas menteri beserta seluruh pejabat Kemendikbudristek,**

Agenda kita tunggal, yaitu pembahasan RKA dan RKP Kemendikbudristek RI Tahun Anggaran 2025.

Apakah disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Atas nama pimpinan komisi, kami menghaturkan terima kasih Pak Menteri, terutama jajarannya, Bu Sekjen, para Dirjen, para Kepala. Dua hari kemarin kita diskusi panjang ditambah 1 hari kemarin sore untuk menuntaskan berbagai agenda terkait dengan postur RAPBN Kemendikbudristek tahun 2025 yang akan datang.

Ada banyak diskusi, debat dan seterusnya, saran, kritik, masukan. Saya kira itu bagian dari semangat Komisi X untuk menjadi mitra yang baik selama 5 tahun terakhir ini dan kita ingin RAPBN 2025 mampu untuk mengakomodasi berbagai dinamika isu pendidikan kita di masa-masa yang akan datang.

Karena itu semua catatan yang tertuang di dalam RDP selama 3 hari kemarin akan menjadi di catatan kita bersama dan spiritnya akan kita implementasikan kita wujudkan dalam alokasi anggaran dari berbagai kegiatan yang sedang akan kita rumuskan dan terus kita rumuskan nanti sampai pada nota keuangan yang disampaikan presiden tanggal 16 Agustus yang akan datang.

Beberapa catatan saya kira tidak perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, karena semua sudah menjadi catatan kita masing-masing, termasuk terkait dengan usulan tambahan Komisi X pada posisi menyetujui, tinggal nanti kita minta perwakilan Anggota Komisi X yang ada di Badan Anggaran untuk menyuarakan dengan kuat terkait dengan penambahan anggaran ini.

Berikut beberapa pencermatan yang sudah dilakukan oleh KPK yang sudah dirilis oleh KPK menyangkut soal porsi anggaran pendidikan kita yang di kelola langsung di bawah Kemendikbud, perguruan tinggi negeri dan seterusnya yang masih kalah dengan alokasi anggaran yang teralokasikan di sekolah-sekolah kedinasan dari Kementerian dan lembaga-lembaga yang kita miliki.

Melalui bekal ini, kita berharap nanti di dalam perjalanannya dalam pembahasan di Badan Anggaran dengan pihak pemerintah, komitmen untuk memperjuangkan penambahan dana dari alokasi 20% untuk sepenuhnya fungsi pendidikan untuk bisa kita dapatkan sampai nanti menuju nota keuangan 16 Agustus yang akan datang.

Demikian beberapa catatan kecil yang sebagai pengantar pada kesempatan yang baik ini, Mas Menteri.

Untuk selanjutnya kami persilakan Mas Menteri untuk menyampaikan dari hasil RDP selama 3 hari kemarin, beberapa perubahan dan komitmen terkait dengan hasil diskusi yang nanti akan kita sepakati bersama.

Sebelum kita persilakan, kita sepakati waktu paling lama jam berapa, Bapak-Ibu? Jam 13, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Oke, terima kasih.

Nanti akan langsung disampaikan oleh Mas Menteri. Nanti ada respon langsung dari fraksi-fraksi, jadi saya ingin ada persetujuan masih karena ini pandangan akhir fraksi jadi satu fraksi cukup diwakili satu orang.

Apakah disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Oke, kami persilakan Mas Menteri.

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
(NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

**Bapak Pimpinan,
Anggota Komisi X,**

Izinkan kami melakukan paparan singkat mengenai hasil RDP dan juga penjelasan mengenai anggaran Kemdikbudristek TA 2025.

Berdasarkan surat bersama pagu indikatif, pagu indikatif Kemendikbudristek, seperti yang kita tahu ditetapkan di 83,19 triliun. *Nah*, per unit eselon 1 pagunya sudah dibahas dalam pertemuan tiga pihak, trilateral, dan untuk TA 2025 ada kenaikan anggaran sebesar 1,4 triliun dibandingkan 2024.

Seperti yang kita ketahui, alokasi tersebut masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan kita atau keinginan kita untuk melanjutkan dan memperbesar beberapa program. Dan juga selain belanja

Kemendikbudristek pada SBPI TA 2025 ditetapkan alokasi anggaran DAK Fisik sebesar 15,3 triliun dan DAK Non Fisik sebesar 127,98 triliun.

Untuk selanjutnya dan detail mengenai hasil keputusan RDP, saya persilakan ke Ibu Sekjen.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.):

Terima kasih Pak menteri.

Bapak Ibu Pimpinan dan anggota Komisi yang kami hormati,

Izinkan kami menyampaikan secara ringkas terkait dengan pembahasan pagu indikatif 2025 hasil RDP yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Juni yang lalu.

Di dalam RDP, kami menjelaskan secara lebih detail rencana kerja anggaran Kemendikbudristek menurut program dan juga unit utama untuk tahun 2025 yang didahului dengan pemaparan capaian sampai dengan tahun 2023 dan juga pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan tahun 2024.

Berbagai capaian pembangunan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kami paparkan antara lain ditujukan oleh meningkatnya partisipasi dan berkurangnya kesenjangan partisipasi pendidikan. Kemudian juga meningkatnya mutu yang ditunjukkan oleh kompetensi literasi dan numerasi yang semakin baik dari hasil asesmen pendidikan, kemudian juga kemahiran berbahasa Indonesia serta indeks pembangunan kebudayaan.

Kami sampaikan pula hal-hal yang masih memerlukan penguatan termasuk di dalamnya perhatian yang lebih besar pada kelompok miskin, pada wilayah tertinggal, wilayah 3T dan juga satuan-satuan pendidikan yang kinerja muridnya masih rendah yang kemudian diperlukan intervensi lebih lanjut melalui program dan kegiatan di tahun 2025.

Output program kegiatan tahun 2023 juga disampaikan secara detail Bapak Menteri dan Bapak Pimpinan, selama RDP dari alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp84,5 triliun terserap sebanyak 95,49%. Sementara untuk tahun 2024 atau tahun berjalan, kami sampaikan perkembangan sampai saat ini dari alokasi anggaran pagu alokasi waktu itu 98,99, kemudian pagu berjalan per sekarang sekitar 101,38% sudah terserap 34,2%.

Berikutnya, kami sampaikan rencana kerja anggaran Kemendikbudristek 2025 sesuai dengan alokasi pagu indikatif yang totalnya sebesar 83,187 triliun, dengan perencanaan anggaran tahun 2025 yang mengacu pada penugasan kepada Kemendikbudristek berdasarkan Naskah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang tertuang dalam Permen PPN Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024.

Dengan pertimbangan bahwa pagu indikatif 2025 masih merupakan *baseline*, kami memprioritaskan kegiatan-kegiatan dengan pembiayaan wajib, baik itu prioritas nasional maupun prioritas kementerian lembaga. Sebagaimana tertuang di dalam paparan halaman 34 yang secara detail dituangkan, termasuk di dalamnya untuk rupiah murni untuk operasional, kemudian juga non-operasional. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui penerimaan negara bukan pajak, kemudian juga dari belanja, dari di BLU dan juga pinjaman luar negeri maupun dari surat berharga nasional.

Kemudian, untuk pembiayaan wajib. Sebagaimana kita tahu, kita punya banyak program yang harus dibiayai wajib hukumnya untuk program-program yang mendapatkan bantuan sosial seperti PIP, KIP, dan juga aneka tunjangan yang harus kita berikan kepada pendidik dan tenaga pendidik, termasuk di dalamnya dosen dan guru besar non PNS.

Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian. Kami laporkan juga, Pak Menteri, bahwa dengan pagu anggaran sebesar tersebut 83,187 yang jauh lebih rendah juga dari tahun 2024, maka memang masih banyak yang belum bisa terbiayai. Berkurang 15,8 triliun dibandingkan dengan pagu alokasi tahun 2023.

Kami mengusulkan untuk tambahan sebesar 25 triliun untuk membiayai kegiatan-kegiatan untuk memastikan program prioritas tetap bisa dilanjutkan dan juga diakselerasi.

Namun demikian, di dalam RDP disepakati perlunya perhatian pada peningkatan kualitas perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi swasta, baik akademik maupun vokasi. Juga diperlukan tambahan untuk bantuan uang kuliah, serta dukungan untuk pendidikan vokasi melalui SMK, di luar SMK pusat keunggulan yang juga masih membutuhkan perhatian, serta berbagai kursus keterampilan melalui kegiatan PKK, PKW.

Perhatian pada Pendidikan Anak Usia Dini juga disepakati untuk mendapatkan perhatian lebih. Sejalan dengan upaya kita untuk melaksanakan Wajib Belajar 13 tahun sebagaimana yang sudah dibahas untuk pembangunan jangka panjang.

Begitu juga pendidikan olahraga sesuai penugasan kepada Kemendikbudristek di dalam desain besar olahraga nasional. Di samping itu, disepakati juga masih perlunya berbagai bantuan pemerintah, terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai melalui dana alokasi khusus.

Pembiayaan-pembiayaan untuk hal tersebut di atas tadi berasal dari baik realokasi internal, dari pagu indikatif yang sudah ada, maupun dana alokasi khusus untuk yang sudah ada di dana alokasi khusus tidak dimungkinkan untuk dibiayai kembali oleh dana dari pusat, serta usulan tambahan yang diharapkan dapat dipenuhi dalam pagu anggaran.

Terkait dengan kebutuhan tambahan anggaran, kami sampaikan tadi Kemendikbudristek mengusulkan sebesar Rp25 triliun yang telah dibahas juga disampaikan oleh masing-masing pimpinan unit utama di dalam RDP kemarin, dengan sebaran menurut program dan unit utama sebagaimana tertuang di dalam paparan. Untuk per programnya tertuang di dalam halaman 53, bagaimana rincian dari 25 triliun tersebut

Kemudian di samping pembahasan tadi, Kemendikbudristek juga menyampaikan akan menyampaikan lebih lanjut hasil evaluasi berbagai program prioritas. Kemudian juga data realisasi anggaran termasuk yang bersumber dari DAK, serta melakukan penguatan regulasi untuk memastikan kebijakan-kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

Paparan berikutnya, terkait dengan dana alokasi khusus yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 juga sifatnya masih pagu indikatif. Untuk kebutuhan baik dana alokasi khusus, fisik, maupun non fisik dana lokasi khusus. Untuk fisik digunakan untuk semua jenjang pendidikan, untuk kegiatan-kegiatan pengadaan peralatan, untuk rehabilitasi sekolah, dan sebagainya sementara untuk DAK Non Fisik digunakan untuk membiayai Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, untuk tunjangan guru, dan juga untuk operasional museum dan cagar budaya.

Demikian Bapak Menteri yang dapat kami sampaikan, kami laporkan pembahasan dan kesepakatan di dalam RDP kemarin.

Terima kasih.

Saya kembalikan waktunya kepada Pak Menteri.

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
(NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):**

Terima kasih, Bu Sekjen.

Demikian dari kami, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

Terima kasih, Pak Menteri.

Terima kasih, Bu Sekjen, penjelasannya.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Sebelum saya berikan kesempatan kepada masing-masing fraksi diwakili satu orang untuk memberikan pandangan akhirnya, saya ingin mendapatkan persetujuan dari Bapak-Ibu sekalian.

Yang pertama, menyangkut soal usulan tambahan dari pihak Kemendikbud yang belum sempat kita bahas di dalam RDP secara detail, jadi

mohon nanti juga mendapatkan persetujuan atau tidak persetujuan dari pandangan fraksi masing-masing.

Tapi pada prinsipnya, kira-kira menyangkut soal tambahan ini sebagaimana komitmen kita untuk menambah alokasi anggaran pendidikan yang sepenuhnya supaya bisa digunakan oleh Kementerian Pendidikan.

Saya kira, begini kira-kira, kita letakkan pada konteks kita menyetujui terkait dengan kegiatan program dan kegiatannya nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain, kira-kira begitu.

Tapi sepenuhnya kita serahkan kepada teman-teman fraksi. Apakah disetujui menyangkut soal penambahan akan kita bahas dalam raker hari ini? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Oke terima kasih.

Bapak-Ibu sekalian,

Selanjutnya, saya persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan, Bang Putra. Kami persilakan, terkait dengan pandangan akhir dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (PUTRA NABABAN):

Baik.

**Pak Ketua Pimpinan yang sangat lengkap di sini yang selalu baik hati dan memberikan arahan,
Teman-teman anggota Komisi X yang terhormat,
Saudara Menteri dan juga seluruh jajaran,**

Yang tentunya kami mengucapkan terima kasih atas tenaganya, pikirannya, waktunya, yang diberikan dalam RDP kemarin. Bahkan *injury time* pun tetap datang kita rapat juga terus sampai menjelang rapat kerja hari ini.

Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, tentunya dalam menyampaikan pandangan saya harus juga mengacu pada laporan singkat yang telah dibuat oleh Komisi X dalam Rapat Dengar Pendapat selama beberapa hari terakhir ini. Dan di situ saya lihat, laporan singkat ini sudah mencakup dan meliputi semua pandangan, sikap kritis, dan juga perjuangan yang disuarakan oleh teman-teman dari berbagai daerah pemilihan dan dari berbagai fraksi.

Saya bahkan ini saya pegang juga yang menjadi pegangan saya adalah laporan singkat dari, apa namanya, dari RDP kita kemarin, terutama terkait dengan juga bagaimana kita menjalin hubungan yang baik di dalam komunikasi dan kemitraan. Pak Ferdi berkali-kali menekankan itu bahkan bukan hanya di Kemendikbud, tapi kepada mitra-mitra lain. Termasuk juga bagaimana evaluasi

program-program beasiswa seperti PIP dan KIPK, ini menjadi garis bawah yang sangat penting yang kita sampaikan.

Terus terang, kalau di dapil kami, di Jakarta Timur, PIP itu beasiswa PIP maupun KIPK itu sangat membantu anak-anak Jakarta Timur, anak-anak DKI Jakarta, khususnya juga membantu mereka ketika mereka, apa namanya, ketika mereka ingin masuk ke jenjang berikutnya. Karena di Jakarta Timur itu DKI Jakarta salah satu apa salah satu syarat untuk bisa PPDB itu adalah PIP Pak, PIP. Jadi, ini sangat menguntungkan sekali buat anak-anak yang ada di DKI.

Dan juga kebetulan juga dilaporkan dampak dan serapannya juga optimalisasinya di tahun ini, tahun 2024 itu luar biasa-luar biasa di atas 99%. Jadi, betul-betul digunakan secara optimal. Ini tentunya karena kerja sama kita dengan Kementerian, dengan dinas, dengan sekolah, dan dengan Komisi X.

Namun demikian, catatan yang disampaikan Pak Andreas yang berulang-ulang kali, meskipun saya yakin Pak Andreas belum datang bukan berarti dia sudah *capek* ngomong tentang operator, gitu ya. Ini saya rasa ini harus menjadi perhatian khusus di mana status operator sekolah itu harus jelas regulasinya dan apalagi kalau mereka bisa dimaksimalkan untuk mengelola Dapodik. Ini yang dirasakan betul di DKI di mana operator itu berfungsi sangat optimal, sehingga anak-anak itu bisa menerima bantuan dengan tepat sasaran, ya.

Termasuk ini, Mas Menteri, yang kemarin juga menjadi garis bawah kita adalah terkait dengan evaluasi 10 PTNBH, terutama dalam pengelolaan kemandirian pembiayaan dan pemenuhan IKU-nya.

Ini yang kemarin kita lihat kisruh terkait dengan UKT dan lain sebagainya. Saya mau menggarisbawahi ada beberapa dekan yang kebetulan saya telepon, lumayan bagus di dalam mengelola komunikasi dengan mahasiswa-mahasiswanya. Jadi, ruang-ruang komunikasi, ruang-ruang protes, ruang-ruang, apa namanya, berbicara antara pimpinan fakultas dengan mahasiswanya itu dibuka secara informal ataupun formal, sehingga keluhan-keluhan mereka itu betul-betul disuarakan.

Nah, ini jangan sampai terjadi hanya pada pimpinan fakultas yang dulu waktu mahasiswa suka demo, yang jarang demo mungkin agak *reluctant* untuk ngomong sama mahasiswanya. Kalau bisa, ini dijadikan satu model supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu betul-betul bisa dikomunikasikan kepada adik-adik mahasiswa.

Nah, ini terkait dengan catatan-catatan ini, saya rasa ini tidak terlepas dari apa yang mau kita sampaikan pada hari ini. Terutama ketika Kementerian meminta persetujuan dari Komisi X terkait dengan pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 sejumlah 83 triliun 187 miliar sekian-sekian, dengan usulan tambahan 25 triliun 13 miliar 159 juta sekian-sekian.

Untuk itu, atas seizin dari Ibu Ketua Poksi PDI perjuangan dan juga teman-teman, kami dari Fraksi PDI perjuangan menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan ini. Dan kami juga akan menugaskan Anggota PDI Perjuangan yang ada di Baleg DPR RI untuk memperjuangkan, di Banggar, mohon maaf. Karena saya di Baleg, iya iya. Aduh, ini ingatnya Undang-Undang Pariwisata. Jadi, menugaskan anggota poksi PDI Perjuangan yang ada di Banggar DPR RI untuk memperjuangkan usulan tambahan anggaran TA 2025.

Saya rasa itu, Ketua, yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Merdeka.

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

Terima kasih, Bang Putra, mewakili dari Fraksi PDI Perjuangan menyetujui terkait dengan pagu indikatif Kemendikbudristek berikut usulan tambahannya.

Terima kasih.

Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar, Ibu Hetifah.

F-GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN., MPP):

Baik.

**Terima kasih Ketua dan Pimpinan Komisi X,
Anggota Komisi X yang saya banggakan,
Mas Menteri, Bu Sekjen, beserta seluruh jajaran dari Kemendikbudristek,**

Dalam Raker sebelum ini dilanjutkan maraton berbagai RDP, Komisi X sudah menerima penjelasan rinci dari Kemendikbudristek terkait prioritas program dan juga alokasi anggaran yang direncanakan untuk tahun 2025.

Kita telah melakukan berbagai evaluasi dan diskusi mendalam, dan bahkan Mas menteri salah satu anggota FPG, senior kami, sudah menyampaikan 24 atau 25 halaman paparan. Semoga bisa menjadi bahan masukan berharga.

Dan kita sudah sampai pada beberapa kesepakatan penting, baik menyangkut prioritas pada peningkatan akses pendidikan. Oleh sebab itu, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Bapak Abdul Kahar sebagai kapus labdik yang sore nanti akan sertijab. Semoga Bapak berkurang tingkat stresnya dan bisa menikmati kehidupan bapak yang lebih baik.

Dan juga tentunya kualitas pendidikan di semua jenjang, kompetensi guru, perbaikan kurikulum, dan juga penguatan untuk transformasi di periode

berikutnya. Semoga lulusan-lulusan kita menjadi lebih kompetitif dalam menghadapi tantangan global.

Kami juga mendukung program digitalisasi pendidikan dengan beberapa catatan, terutama masukan dari rekan-rekan kami, khususnya Ibu Anita, Ibu Ros, perhatian khusus kepada daerah 3T yang mungkin memang pengembangan infrastruktur digital dan pelatihan ataupun pendidikan bagi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan masih perlu diprioritaskan agar program ini berjalan efektif, begitu Mas Menteri.

Demikian juga tentunya terkait pembiayaan pendidikan, kami juga senang bahwa perhatian dari Kemendikbudristek ke depan kepada sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi swasta dan PAUD juga akan terus ditingkatkan. Dan juga alokasi anggaran untuk riset dan inovasi, termasuk kerja sama industri untuk menghasilkan inovasi yang berdampak positif bagi pembangunan nasional menjadi perhatian kita bersama.

Yang tidak kalah pentingnya, tentunya adalah pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional dan daerah. Dan tentu saja untuk museum dengan adanya BLU itu juga kita terus dukung. Mudah-mudahan warisan budaya dan juga promosi kebudayaan kita di kancah internasional bisa terus didukung dan dikembangkan.

Dan terakhir, tentunya kami juga tetap mendesak Kemendikbudristek untuk segera menyelesaikan berbagai isu mendesak yang sudah kita bahas dan juga mungkin dalam waktu dekat akan terus muncul, seperti PPDB dan lain-lainnya, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemahaman yang lebih baik dan kesamaan pemikiran dengan berbagai pemangku kepentingan, tentunya menjadi sesuatu yang sangat diperlukan untuk bisa menyelesaikan isu-isu mendesak ini.

Kami dari Fraksi Partai Golkar menyetujui pagu indikatif sebesar Rp83.187.821.056.000 dan juga usulan tambahan yang akan kami minta kepada Banggar, khususnya dari Fraksi Partai Golkar, untuk memastikan tambahan sebesar Rp25.013.159.081.000 ini bisa dipenuhi.

Demikian Bapak ketua.

“Nelayan pulang membawa ikan,
Hasil tangkapan dari lautan,
Anggaran pendidikan harus ditingkatkan,
Agar kegiatan bisa berkelanjutan”.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

f

Walaikumsalam.

Terima kasih, Ibu Hetifah, mewakili pandangan akhir Fraksi Partai Golkar dan menyetujui dua agenda yang sedang kita bahas.

Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi Partai Gerindra.

Silakan, Bang.

F-GERINDRA (Ir. H. NUROJI):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya mewakili Fraksi Gerindra.

**Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Komisi X,
Pak Menteri dan seluruh jajaran,**

Pandangan kami terhadap hasil konsinyering dan rapat-rapat terkait anggaran Kemendikbudristekdikti.

Yang pertama, terkait anggaran. Kami tanpa merinci program dan lain-lainnya, menyepakati angka 83 triliun dan juga usulan tambahan secara gelondongan yang belum kita bahas untuk bisa diperjuangkan di dalam Banggar. *Nah* itu terkait dengan anggaran.

Kemudian, ada catatan sedikit untuk di akhir periode ini. Mungkin tadi karena masih cukup banyak kekurangan untuk pembiayaan pendidikan kita melalui Kemendikbudristek ini. Saya ingin mengangkat kembali isu tentang pengintegrasian fungsi pendidikan yang ada di akademi di kementerian dan lembaga lain.

Kalau kita lihat postur anggaran kita, postur anggaran pendidikan kita itu sangat jelas ya, di Kemendikbudristek hanya sebagian 15% dari 20% atau 665 triliun. Kemudian, di Kementerian Agama ada 62 triliun, dan kementerian lembaga lain ada 32 triliun yang utamanya adalah pembiayaan akademi-akademi atau Politeknik yang sebagian sebetulnya ada di prodi-prodi perguruan tinggi negeri.

Nah, menurut saya yang seperti itu bisa diintegrasikan ke dalam perguruan tinggi negeri. Jadi, ditarik ke dalam pendidikan tinggi negeri, sehingga tidak ada duplikasi dan dobel anggaran kemudian kesenjangan ya, kesenjangan fasilitas. Jadi kalau yang di kementerian lain itu mahasiswa mewah untuk tingkat akademi ini mewah, dari mulai diberikan uang saku, kemudian seragam dan juga asrama. Itu tentu saja memerlukan biaya yang tinggi. *Nah*, sementara di perguruan tinggi negeri, ya tentu ini tidak seperti itu, bahkan mahasiswa harus mengeluarkan biaya hidup sendiri.

Nah, ini perlu pemikiran ya, mungkin di akhir periode ini ada satu rekomendasi dari Kemendikbud dan juga DPR. Dulu pernah kita bahas dalam pembahasan undang-undang perguruan tinggi. Pak Ferdi ikut juga ya, yang lain itu pernah dibahas ini pengintegrasian ini dalam rangka memenuhi 20% anggaran pendidikan kita di Kemendikbudristek, tetapi ya masih sangat sulit waktu itu dan ini saya yakin juga akan menemui langkah yang apa halangan yang berat. Namun, tidak salahnya kita munculkan kembali Pak Menteri, catatan akhir periode ini untuk bisa memenuhi kekurangan biaya pendidikan kita di kekurangan pendidikan kita di formal ya di tingkat formal. Itu satu.

Kalau lihat juga ada dana di transfer ke daerah itu sangat besar, 346 triliun termasuk dana desa. Pertanyaannya, di desa fungsi pendidikannya apa gitu, dilaksanakan *nggak*? Kalau saya sih di kelurahan saya *nggak* yakin juga ada dia bikin kursus atau apa gitu. Mungkin hanya untuk rapat-rapat barangkali.

Nah, ini perlu dievaluasi ada besar sekali transfer ke daerah ini apa bentuknya, Fungsinya? DAU saya lihat ada rinciannya DAU ya dan DAK. *Nah*, ini terutama penggunaan dana desa yang saya saya kritisi untuk apa itu? *Nah*, ini bisa langkah ini bisa memenuhi kebutuhan Kemendikbudristek yang tadi yang masih cukup banyak yang harus dilakukan dan sekaligus memberikan tanggung jawab kepada pemerintah lebih besar dalam hal bidang pendidikan, jadi tidak lebih besar kepada masyarakat, dalam hal ini swasta. Jadi itu catatan saya.

Kemudian, dulu ada namanya dewan pendidikan nasional ya, yang bisa merembukkan hal-hal seperti ini. Kalau *nggak* salah sudah tidak ada sekarang. Ya akhirnya jadi seperti sekarang sendiri-sendiri tidak ada yang mengintegrasikan hal-hal penting seperti ini ya. Mungkin ini juga catatan tidak ada salahnya kalau dibentuk kembali dewan pendidikan nasional ini yang salah satu anggotanya adalah waktu itu wakil presiden.

Kemudian, kemarin juga kita bicara tentang perpustakaan yang setiap tahunnya tidak pernah berhasil dapat banyak anggaran. Kalau melihat fungsinya selayaknya perpustakaan itu ada dikoordinasikan di Kemendikbud ya, termasuk *support* anggarannya. *Nah*, ini juga perlu pemikiran. Saya melihat perlu revisi undang-undang kementerian atau bagaimana nanti, supaya perpustakaan ini bukan jadi badan tersendiri, tetapi dia ada di bawah Kementerian Dikbud, karena kaitannya fungsinya sangat berkait dengan pendidikan.

Lalu, secara prinsip saya mendukung juga apa yang dilakukan oleh Pak Menteri selama ini tentang transformasi pendidikan kita. Walaupun di sana-sini masih kurang ya, kekurangan, terutama kurang berkeadilan. Karena hanya menjangkau masyarakat-masyarakat yang mampu, namun yang tadi 3T dan tentu bukan cuma 3T saja, di kampung-kampung yang ketinggalan juga masih banyak di kota-kota yang belum merasakan transformasi ini. Jadi, asas berkeadilannya kita tingkatkan pada periode berikutnya.

Kemudian terakhir, saya kemarin belum sempat dalam konsinyasi untuk menanyakan tentang buku-buku yang memuat isi yang terkait dengan kekerasan seks dan pedofilia dan LGBT. *Nah*, itu bagaimana Pak, itu bisa lolos di dalam badan perbukuan? Namanya sekarang apa BKSAP, ya? *Nah*, itu bisa lolos bagaimana Pak itu? Apa timnya ini yang teledor ini bisa meloloskan buku-buku semacam itu dan ini cukup membahayakan bagi anak didik kita.

Selesai, itu saja pimpinan. Sekali lagi kami setuju terkait dengan anggaran tapi itu catatan tambahan kami cukup banyak mudah-mudahan bisa direalisasikan.

Oh ya, terakhir satu lagi, ini penting. Sekedar usul dan catatan saja. Jadi, karena fungsi kebudayaan ini ada di nanti di pariwisata dan di pendidikan juga ya. Kami ya usul saja, mungkin diperjuangkan sama-sama oleh kawan-kawan untuk kebudayaan dipisah saja jadi Kementerian Kebudayaan begitu kira-kira.

Terima kasih, pimpinan.

Wassallam.

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

Terima kasih Bang Nuroji, atas catatan dan persetujuannya menyangkut soal pagu indikatif 2025 dan tambahan anggaran untuk tahun 2025.

Berbagai catatan tadi akan menjadi *concern* kita semua, terutama teman-teman di Kemendikbudristek.

Selanjutnya, kami silakan Mbak Ratih dari Fraksi Partai Nasdem.

F-NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang kami hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi X,
Mas menteri beserta seluruh jajaran,**

Semoga semua selalu dalam kondisi sehat *walafiat, amin ya rabbal alamin.*

Saya langsung saja. Secara garis besar, dari Fraksi Nasdem kami mendukung apa yang telah menjadi pembahasan antara Komisi X dengan kawan-kawan di Kemendikbudristek terkait kebutuhan anggaran ataupun adanya penambahan anggaran untuk tahun 2025 nanti dengan catatan dan pemikiran sebagai berikut.

Yang pertama, saat ini kami semua sadar bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia memang cukup unik, yang mungkin tidak, memiliki keunikan yang mungkin tidak optimal dalam hal efisiensi. Banyak lembaga pemerintahan atau kementerian memiliki perguruan tinggi sendiri yang di mana hal tersebut menyebabkan alokasi anggaran pendidikan tersebar dan tidak terpusat dengan baik. Bahkan, baru-baru ini kami dapat info juga KPK telah mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan dan pemerintah, lebih banyak mengalir ke kampus yang dikelola oleh kementerian ataupun lembaga lain dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri.

Dan oleh karena itu, kami dari Fraksi Nasdem mengusulkan agar kita juga harus mempertimbangkan restrukturisasi dan manajemen ulang pendidikan tinggi, agar bisa dapat lebih terfokus di bawah koordinasi Kemendikbudristek. Yang di mana langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan penggunaan anggaran secara lebih efisien tapi juga niatannya adalah untuk memperkuat manajemen akademik dan juga keuangan sehingga kualitas pendidikan tinggi kita tentunya bisa lebih dijamin.

Lalu juga, kami dari Fraksi Nasdem menyoroti terkait masalah pengawasan, anggaran yang besar itu seringkali tidak terserap dengan baik dan ini menunjukkan kami mengkhawatirkan adanya masalah dalam manajemen pengawasan. Contoh tadi sudah di sampaikan terkait dana transfer daerah oleh Bang Oji kurang lebih sebesar 346 triliun, yang di mana kami cukup jarang mendapatkan *feedback*-nya anggaran ini apakah sudah seutuhnya betul-betul terserap dengan baik begitu sudah terkirim di daerah? Dan apakah betul untuk fungsi pendidikan di daerah tersebut? Karena sebenarnya di lapangan masih banyak sekali kasus-kasus, seperti contohnya guru-guru yang mereka di mana belum menerima SK padahal sudah lulus P3K. Lalu juga banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai yang di mana ini kami mengindikasikan bahwa dana besar tersebut yang dialokasikan mungkin belum tepat sasaran. Dan ini menurut kami adalah masalah serius yang harus perlu tindakan dengan segera.

Lalu, masih terkait pembiayaan pendidikan tinggi, kami juga memahami kekhawatiran yang muncul di masyarakat terkait isu kenaikan UKT di tahun depan. Kami ingin menegaskan sekali lagi Fraksi Nasdem bahwa kebijakan pendidikan itu harus inklusif dan juga berkelanjutan. Memastikan bahwa setiap siswa-siswi kita itu memiliki akses gitu ya. Tidak peduli dengan latar belakang ekonomi mereka seperti apa yang penting mereka memiliki akses ke pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa beban finansial yang berlebihan.

Lalu juga kita harus mempertimbangkan kembali struktur UKT saat ini yang mengeksplorasi model pembiayaan yang lebih adil, tidak hanya meringankan beban bagi keluarga yang tidak mampu, tetapi juga bagi keluarga kelas menengah yang mungkin memiliki lebih dari satu atau anggota keluarga yang mengenyam pendidikan tinggi.

Dan sebenarnya yang kelas menengah ini adalah kelompok yang terkadang kita *miss*. Jadi, mereka tuh kan posisinya nanggung, miskin tidak, kaya juga tidak, tapi tanggungannya juga banyak.

Jadi, kami juga mengusulkan bahwa kalau bisa ada beasiswa prestasi untuk anak-anak ini juga diberikan, karena prestasi itu kan tidak melulu sebenarnya untuk yang tidak mampu, tapi sebenarnya yang di kelas menengah inilah sasaran utamanya, yang tadi saya bilang mereka ini ada di kelompok di tengah-tengah. Jadi, tolong perhatiannya juga untuk kelompok yang kelas menengah ini.

Dan juga itu terakhir, dan dengan ini kami dari Fraksi Partai Nasdem menyetujui pagu indikatif Kemendikbudristek yang sudah ditetapkan sebesar 83,19 triliun dengan ada usulan tambahannya sebesar 25 triliun. Kami menyetujui hal itu.

Terima kasih Pimpinan.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

Makasih Mbak Ratih, atas pandangan akhir fraksi dari Fraksi Nasdem berikut beberapa catatannya.

Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mas Dafi.

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI., S.H.,M.H):

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera kepada kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,*

**Yang saya hormati, Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi X,
Yang saya banggakan, Mas Menteri Kemendikbud Ristekdikti beserta seluruh jajarannya,**

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya memberikan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berkenaan dengan postur anggaran.

Kita ketahui bersama, bahwa pendidikan Indonesia ini menghadapi banyak tantangan bagaimana bisa melahirkan generasi emas di 2045. Tentunya banyak langkah-langkah yang telah dilakukan masa periode Bapak

Jokowi di 2019 hingga 2024, salah satunya di pendidikan adalah kita mendorong merdeka belajar dan juga kampus merdeka. Tentunya, ini haruslah bisa memberikan suatu terobosan baru untuk kemajuan masa keemasan bangsa.

Data yang kita ketahui, bahwa dari QS *ranking university*, kampus-kampus terkemuka di Indonesia itu masih belum bisa kita dorong untuk masuk dalam 100 besar kampus terbaik dunia. Ini masih menjadi catatan kita semua karena memang tetangga-tetangga kita, seperti halnya Malaysia itu Universitas Malaya saja sudah masuk di 60 besar. Kemudian juga kalau seperti halnya NUS maupun juga Nanyang, itu memang sudah masuk di 10 besar, Mas Menteri. Ini menjadi PR kita bersama bagaimana kita bisa mendorong kampus-kampus besar kita itu bisa masuk dalam 100 besar kampus terbaik dunia

Tentunya, ini tidak apa, tentunya ini semua sangat berkaitan dengan penganggaran Mas Menteri. Oleh karena itu, postur anggaran pendidikan kita ini haruslah kita evaluasi agar bisa tepat sasaran.

Saya pernah menyampaikan di Banggar, bahwa Universitas Malaya itu satu kampus saja itu anggarannya 1,5 triliun, Mas Nadiem. Makanya mereka sekarang bisa lompat menjadi nomor 60 terbaik dunia. Sedangkan kita di Kemendikbudristekdikti, anggaran kita hanya 15% dari anggaran fungsi pendidikan dan tentunya Dirjen Dikti mendapatkan anggaran ya *nggak* pernah lebih dari 40 triliun, selalu diangka 30 triliun. Tentunya ini menjadi catatan kepada kita bersama untuk mengurus sekian ribu lebih dari 3.000 kampus PTS maupun juga PTN di Indonesia, ini menjadi PR besar. Dan akhirnya, terjadi kendala-kendala dalam mendorong lahirnya suatu kemajuan-kemajuan yang cukup luar biasa dalam persaingan global.

Dalam proses pendidikan hari ini, kita ketahui bahwa permasalahan-permasalahan masih juga kita hadapi yaitu:

Yang pertama, adalah bagaimana pengangkatan kesejahteraan para guru. Hari ini, masih dikeluhkan guru-guru honorer yang bisa belum mendapatkan pengangkatan SK guru P3K. Dan di saat ketemu kemarin juga mereka menyampaikan, ternyata yang sudah dapat SK, itu juga mau perpanjang juga cukup sulit, Mas Nadiem. Malahan ada yang mengungkapkan di kita itu sampai perpanjang itu ada oknum-oknum yang menarik bayaran.

Ini menjadi catatan kepada kita semua. Mudah-mudahan nih, KPK juga harus melihat itu. Jadi, jangan sampai lagi guru-guru yang melakukan fungsi yang sangat mulia tetapi dibebankan dengan persyaratan yang mempersulit mereka.

Kemudian juga bicara infrastruktur. Kita ketahui bersama bahwa di saat pandemi kemarin, banyak sekali anggaran *refocusing* untuk kesehatan. Akhirnya, usulan untuk perbaikan sekolah-sekolah banyak sekali menjadi PR. Hampir sebagian besar sekolah-sekolah di Indonesia sekarang boleh dikatakan sebagian besar itu tidak layak, Mas Nadiem. Jadi, bangunan-bangunannya sudah yang rusak dan ini menjadi suatu permasalahan kepada kita bagaimana bisa mereka bisa belajar dengan tenang.

Kemudian juga bicara dengan kurikulum kita juga harus kita terus kembangkan, kita evaluasi bagaimana bisa melahirkan suatu terobosan-terobosan baru dan nantinya melahirkan lulusan-lulusan yang berdaya saing dan juga unggul.

Kemudian juga kita masih punya PR besar penggunaan teknologi. Masih banyak sekolah-sekolah kita yang belum mendapatkan akses teknologi, ditambah lagi masih banyak wilayah-wilayah 3T itu. Jangankan akses teknologi, jaringan pun belum ada. *Nah*, ini menjadi catatan kepada kita semua.

Kemudian, penguatan pendidikan vokasi. Ya, kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa agak sedikit sedih ya sebenarnya dengan turunnya anggaran berdampak kepada turunnya anggaran di sektor vokasi. Kita ketahui data dari BPS bahwa vokasi kita penyumbang pengangguran yang cukup besar. *Nah*, ini menjadi catatan bagaimana bisa melakukan suatu terobosan dengan kolaborasi dengan dunia kerja, agar dunia kerja juga bisa membantu vokasi ini bisa punya suatu lompatan baru, agar lulusannya bisa langsung terserap di dunia kerja.

Kemudian juga fungsi dari dukungan para perguruan tinggi swasta menjadi catatan juga, Mas Nadiem. Kita harus pahami, bahwa swasta, pendidikan swasta ini merupakan peran yang sangat strategis dalam melahirkan Indonesia Emas di 2045. Sekolah-sekolah swasta maupun juga perguruan tinggi swasta juga harus menjadi perhatian utama kita.

Kemarin dengan banyaknya guru yang masuk dari honorer menjadi P3K, banyak mereka yang akhirnya harus berpindah penempatan di sekolah-sekolah negeri. *Nah*, ini harus kita carikan jalan keluar Mas Nadiem, agar mereka bisa dikembalikan ke sekolah asalnya. Karena di saat kami turun ke dapil, hampir semua sekolah swasta menyampaikan hal tersebut guru-guru terbaik mereka itu ditempatkan di tempat lain di saat mereka lulus P3K.

Kemudian juga terakhir, yaitu akses pendidikan. Ini dengan turunnya, kita ketahui bahwa dengan tambah penambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan beasiswa itu semakin tinggi. *Nah*, ini menjadi catatan agar kita bisa memberikan akses pendidikan beasiswa, baik itu program PIP, maupun juga program KIP. Dan juga kita bisa mendorong beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Karena ini menjadi harapan dari masyarakat banyak sekali masyarakat-masyarakat kita boleh dikatakan setelah pandemi ini ekonominya pas-pasan. Jadi, kalau di kalau harus berjuang lagi menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi maka keluarganya jadi keluarga yang tidak mampu Mas Nadiem. Jadi, yang pas-pasan kalau memaksakan anaknya untuk kuliah, jadi keluarganya jadi tidak mampu.

Nah, ini harus kita cari jalan keluar agar bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak terbaik bangsa untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, berkenaan dengan pagu indikatif dan juga tambahan anggaran kami bisa menerima.

Terima kasih.

*Wallahu wa fiq illa aqwamit thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

Terima kasih, Mas Davi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa telah menyampaikan pandangan akhirnya. Berikut berbagai catatannya dan menjadi *concern* kita semua.

Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi Partai Demokrat, Mas Bramantyo.

Kami persilakan.

F-DEMOKRAT (BRAMANTYO SUWONDONO M., M.IR):

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang kami hormati, pimpinan Komisi X beserta Anggota Komisi X,
Yang kami hormati, Menteri Pendidikan Budaya dan Ristek beserta jajaran
yang telah pada datang pada pagi hari ini,**

Mengawali apa yang menjadi *statement* dari Partai Demokrat, 4 tahun sudah kita bermitra bersama Kemendikbud dan bisa dikatakan inilah momentum tahun terakhir untuk periode sekarang kita bermitra, bekerja sama untuk menjawab segala macam tantangan-tantangan kependidikan.

Selama bermitra 4 tahun terakhir ini, banyak yang kita sudah perjuangkan dan banyak diterima oleh apresiasi baik oleh masyarakat.

Yang pertama, adalah bagaimana kita memperjuangkan selama masa pandemi Covid itu adalah potongan UKT. Bantuan UKT itu sangat membantu masyarakat sehingga masyarakat bisa dikatakan tidak perlu putus kuliah selama berkuliah.

Selanjutnya, juga bicara soal dukungan PIP maupun juga KIP yang berjalan sangat-sangat diapresiasi oleh masyarakat, mendukung apa yang

menjadi visi kita semua, harapan kita semua pada 2045 tercapai cita-cita kita menjadi Indonesia generasi emas.

Oleh karenanya, kerja sama antara DPR RI dan juga Kementerian haruslah seperti itu, yang saling menguatkan agar kita bisa menjawab seluruh tantangan. Karena kita semua hadir di sini, di bawah sumpah untuk memperjuangkan perbaikan di dunia pendidikan Indonesia.

Selanjutnya, Pak Menteri, walaupun memang kita secara kerja kita selama 4 tahun banyak membuahkan hasil dan juga apresiasi dari masyarakat, tetapi masih banyak catatan-catatan. Apalagi 2045 ini kita bicara tinggal 21 tahun. 21 tahun menurut kami adalah bukanlah waktu yang cepat, ini bukanlah waktu yang lama mohon maaf, tapi merupakan waktu yang cepat. Kalau kita tidak bersiap-siap dalam hal menginvestasikan yang terbaik untuk pendidikan Indonesia.

Beberapa catatan bagi kami dari Partai Demokrat yang bisa di-*highlight* ataupun diperjuangkan untuk periode berikutnya dan juga anggaran berikutnya adalah bicara ini saya juga mewakili rekan-rekan kami di 3T, tapi menurut kami juga saya di yang memiliki daerah pemilihan di Jawa Tengah juga merasakan soal ini.

Yang isu pertama adalah guru, Pak. Kesejahteraan guru ini masih perlu kita tingkatkan, karena momentum lompatan besar pada pendidikan itu kuncinya di guru. Kalau bicara soal akses kepada internet akses kepada buku, kita bisa sampaikan itu adalah semacam percepatan, tapi inti dasarnya adalah guru. Dan banyak kita masih temukan di lapangan, guru-guru yang lolos P3K ini belum menerima SK-nya sampai saat ini. ini tolong di menjadi perhatian bersama.

Selanjutnya, selain itu juga masih banyak juga guru-guru yang memiliki status honorer maupun juga status yang belum memastikan mereka bisa dengan semangat memberikan kualitas pendidikan yang terbaik. Kita tidak bisa berekspektasi tinggi tentang bagaimana suatu pendidikan itu bisa dibawa di ruang-ruang kelas dengan memiliki kualitas yang baik, kalau misalnya kebutuhan dasar saja tidak kita bisa penuhi.

Selanjutnya, Pak Menteri, ini juga yang kita alami di lapangan adalah berkenaan dengan soal digitalisasi, bagaimana banyak program-program dari Kementerian pelatihan-pelatihan itu melewati daring, padahal banyak sekali di daerah-daerah ini belum terkoneksi dengan internet.

Hadirnya dengan pelayanan internet yang tembak langsung ke satelit pun juga belum bisa menjadi jawaban yang utuh, karena secara pengoperasionalannya dan juga secara pembiayaannya juga cukup mahal. Jadi, kami harapkan kebijakan-kebijakan dari Kementerian juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Memang betul, bahwa dengan hadirnya kebijakan yang digitalisasi dengan pelatihan melewati Zoom dan segala macamnya memang membantu. Tetapi, banyak daerah-daerah ini masih memiliki tantangan besar secara mendasar secara internet dan segala macamnya.

Karena efek dari ini bukan hanya bicara bagaimana kita bisa meng-*upskilling* mereka tetapi juga efeknya ke urusan pribadi Pak kehidupan mereka, kesehari-hariannya.

Banyak permasalahan keluarga di guru-guru ini jadi muncul karena kondisi kebijakan yang tidak menunjang dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga itu yang perlu kita inikan.

Selanjutnya Bapak, kami juga menyampaikan untuk mengenai tunjangan khusus, tunjangan khusus untuk daerah-daerah terpencil juga perlu dicairkan. Karena masih banyak yang belum cair dan hampir sudah mengenai waktu 6 sampai 8 bulan. *Nah*, ini yang perlu yang dipikirkan bersama dan juga diperjuangkan di tahun berikutnya.

Dan Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian, berkenaan dengan pagu indikatif, memang kita kemarin sudah menghabiskan waktu sekitar 2 hari lebih ya untuk bicara ini. Banyak tarik ulur dan juga banyak, apa istilahnya, pendalaman yang perlu kita lakukan. Tapi, semuanya itu didasari oleh keinginan kita kemauan. Kita dari Komisi X ini untuk kebaikan dari pendidikan Indonesia. Jadi, itu semoga bisa dipahami secara bersama karena esensi dari kemitraan adalah untuk kita bisa bekerja sama dan saling menguatkan satu sama lain.

Bicara soal pagu indikatif Tahun Anggaran 2025, Partai Demokrat menyetujui sebesar 83.187.821.056.000 beserta usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2025 yang sebesar 25.013.159.081.000. Semua ini karena dipikirkan oleh Partai Demokrat adalah suatu *urgency* untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya.

Kami harapkan bahwa pelaksanaan kegiatan pagu anggaran Kemendikbudristek ini dilaksanakan dengan baik, sehingga menciptakan kesejahteraan dan juga kemajuan yang pesat dalam dunia pendidikan Indonesia.

Sekian dan terima kasih dari saya.

Wasaalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Mas Bram.

Pandangan akhir fraksi dari Fraksi Partai Demokrat berikut catatan-catatannya.

Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi PKS, Pak Fahmi Alaydroes.

F-PKS (Dr. H. FAHMI ALAYDROES., M.M., M.Ed.):

f

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati, Pimpinan Komisi X,
Teman-teman Anggota,
Yang saya hormati juga Pak Menteri beserta jajaran,**

Alhamdulillah selama ini kemitraan kita berjalan baik, produktif dan dinamis. Kita sama-sama paham, sama-sama mengerti, masing-masing kita berdiri pada posisi untuk memperjuangkan agar pendidikan nasional kita menjadi pendidikan nasional yang bermutu dan merata. Masing-masing kita punya posisi yang berbeda, satu di eksekutif satu di legislatif, tetapi semuanya berujung sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat.

Percayalah, Pak Menteri dan kawan-kawan dan semua jajaran, kami di Komisi X tentu ketika terjun ke lapangan, ke dapil maupun ke daerah-daerah lain dalam konteks kunker, pasti melihat mendengar merasakan segala macam denyut dan detak nadi pendidikan nasional kita di berbagai daerah. Ternyata memang sangat luar biasa tantangan dan beratnya masalah pendidikan nasional kita.

Oleh karena itu, kita semua berharap agar kemitraan ini terus berjalan dengan sebaik-baiknya dan semakin efektif dan produktif. PKS memandang, bahwa masih banyak sekali persoalan pendidikan nasional. Meskipun kita telah berupaya untuk terus-menerus meningkatkan, terutama dalam hal pemerataan akses atau kesempatan pendidikan yang bermutu dan merata, baik PAUD, dasar menengah, maupun pendidikan tinggi. Masih banyak sekali amanah yang berat ini belum tertunaikan, masih banyak daerah-daerah yang memerlukan perhatian dan *support* kita.

Amanah yang berat ini yang terpikul kepada kita, baik pemerintah maupun DPR, dalam hal ini Kemendikbud dan Komisi X, sangat penting untuk kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam rangka mengejar ketertinggalan negara kita dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di kawasan Asia, ASEAN, maupun pun di global, di dunia.

Dan inti persoalan dari pendidikan nasional kita, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah dalam konteks pemerataan akses kesempatan pendidikan yang bermutu dan merata. Dan ini erat kaitannya dengan beberapa hal yang sangat mendasar, seperti juga yang sudah disebutkan oleh teman-teman yang lain.

Pertama, kecukupan kompetensi dan kesejahteraan guru. Ini menurut saya memang sangat-sangat prioritas. Ketika guru cukup kompeten dan kesejahteraan mereka cukup, maka pendidikan nasional kita *insyaallah* akan berjalan dengan baik. Tentu akan lebih hebat lagi, lebih lebih cepat lagi, lebih bagus lagi, ketika tentu saja infrastruktur, sumber, dan media pembelajaran juga semakin kaya, semakin lengkap. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kurikulum yang ajeg, relevan untuk pendidikan anak-anak kita.

Oleh karena itu, PKS memandang semua bergantung pada dua hal, yaitu komitmen atau *political will*, yang kedua adalah ketersediaan anggaran. Komitmen dan *political will* ini terkait dengan kita sebagai pejabat sebagai orang diberikan amanah untuk terus-menerus mengasah dan mengasuh integritas kita untuk berjuang bersama menegakkan mutu pendidikan nasional kita.

Adapun anggaran, tentu saja menjadi keniscayaan. Tidak ada anggaran, tidak mungkin kita bisa menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, PKS mendukung penuh politik anggaran pendidikan nasional, terutama tentu saja yang terkait dengan optimalisasi 20% anggaran pendidikan nasional kita.

PKS mengingatkan dan mendesak atau mengharapkan Kemendikbud untuk lebih aktif melakukan berbagai upaya komunikasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk juga dengan pemerintah daerah, dalam upaya mengoptimalkan 20% anggaran pendidikan. Agar 20% anggaran pendidikan itu benar-benar berfungsi efektif dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional kita dan sekaligus pemerataannya ke seluruh Indonesia.

Kemudian yang berikutnya, PKS juga mengingatkan Kemendikbudristek RI tentang alokasi 20% APBN itu difokuskan pada ketercapaian wajib belajar 12 tahun. Ini terkait erat dengan apa yang tadi disampaikan di awal.

PKS juga, Fraksi PKS juga mendesak agar Kemendikbudristek fokus pada ketercapaian wajib belajar 12 tahun yang berkualitas merata inklusif dan aksesibel bagi anak-anak Indonesia di mana pun berada.

Fraksi PKS mengingatkan Kemendikbudristek agar unit layanan disabilitas bidang pendidikan di tingkat provinsi, kota, kabupaten dan perguruan tinggi segera didirikan dan dioptimalkan tugas dan fungsinya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kemudian, Fraksi PKS juga mendorong agar pendidikan tinggi di Indonesia menjadi pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi tujuan pendidikan nasional, inklusif dan mudah diakses oleh segenap lapisan masyarakat yang ingin menuntut ilmu pada jenjang pendidikan tinggi, mengingat populasi atau jumlah mahasiswa dan sarjana di Indonesia, masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Kemudian, Fraksi PKS juga mendesak Kemendikbudristek memberikan perhatian khusus dan dukungan dalam pemerkuatan pendidikan menengah vokasi dan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia, untuk melahirkan angkatan kerja dengan kompetensi yang siap pakai dan siap kerja.

Akhirnya, Fraksi PKS memandang bahwa usulan penambahan anggaran bagi Kemendikbudristek Republik Indonesia, PKS mendukung dan sekaligus mendorong kementerian segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Bappenas RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus juga mengingatkan agar usulan tambahan anggaran yang mudah-

mudahan disetujui diperjuangkan oleh teman-teman di Badan Anggaran. Pembiayaan didedikasikan atau dialokasikan, tentu saja untuk hal-hal yang sangat *urgent*, sangat mendasar.

Demikian apa yang disampaikan oleh Fraksi PKS mewakili Bu Ledia yang berhalangan hadir, mudah-mudahan bermanfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Fahmi mewakili dari Fraksi PKS, sudah menyampaikan pandangan akhir berikut catatan-catatannya.

Selanjutnya, kami persilakan Ibu Iliza dari Fraksi PPP.

F-PPP (Hj. ILLIZA SAADUDDIN DJAMAL., S.E):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah.

**Yang saya muliakan, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi X,
Mas Menteri, Bu Sekjen, seluruh jajaran,
Wabilkhusus Pak Kahar yang *insyaallah* besok akan purna tugas,**

Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa selama ini.

Yang pertama, saya ingin sekedar mengingatkan kembali pada dalam perkembangan pagu realisasi anggaran Kemendikbudristek per unit Eselon I tahun 2024, bahwa ini semester 1 akan berakhir, akan tetapi beberapa Eselon I perkembangan dan penyerapan anggaran belum mencapai setengah dari pagu anggaran yang ada. Efektivitas dan efisiensi anggaran agar sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat pada tahun lalu dan sudah disepakati di antara Komisi X dan pemerintah agar segera diselesaikan penyerapannya.

Kemudian, dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 dalam komponen anggaran pendidikan untuk anggaran 2024 ini, ada dana yang berasal dari cadangan anggaran pendidikan BA BUN bagian anggaran bendahara Umum Negara 99 sebesar 47.373.270.074, halaman 32. Mungkin ini Bu Sekjen mohon penjelasan posisi anggaran tersebut akan di-*insert* atau diperuntukkan di program dan eselon berapa?

Kemudian, terhadap program Ditjen GTK 2025, program pengembangan karir dan penghargaan guru serta penyusunan kebijakan pendataan guru di daerah, tentu kami sangat mengapresiasi hal tersebut mengingat bahwa kebijakan ini diarahkan untuk memanusiaikan guru dengan pengembangan dan penghargaan karirnya.

Kita tahu, bahwa guru merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan. Peran guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. *Nah*, kualitas guru itu sangat menentukan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Kualitas guru dapat dilihat dari kompetensi, profesionalisme dan kesejahteraan guru. Terkait dari hal ini, data yang ada jumlah kepala sekolah dan guru sekitar 2.996.818, terdapat 1.736.098 yang belum mendapatkan sertifikat dan itu terbanyak di sekolah swasta.

Nah, dengan angka yang ada yang mungkin kami baca kemarin, mohon maaf Prof. Nunu, kita belum sempat bertanya, kami ingin tahu kira-kira nih targetnya kapan kepala sekolah dan guru terkait sertifikat pendidikan ini? Karena tentu ini terkait terhadap kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan mereka.

Kemudian, terkait juga dengan perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan dari perundungan kekerasan seksual dan intoleransi. Kami berharap ada jaminan sebagaimana pekerja yang lain, terutama para guru dan tenaga kependidikan yang honor, misalnya jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan untuk para honorer tersebut.

Dan kemudian survei dengan menggunakan *teach primary* menunjukkan bahwa lulusan guru penggerak memiliki kualitas pengajar yang lebih baik dibanding dengan guru di Indonesia lainnya. Dalam survei ini, apa yang menjadi variabel dalam *teach primary*.

Kami merespon baik juga adanya program pengembangan kompetensi guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan adalah program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK melalui pelatihan, pendampingan, dan penggiatan kolektif guru. Jadi, ini mungkin mohon penjelasan kurikulum dan modul yang menjadi mata pelajaran Apakah berkolaborasi dengan Dinaspora? Dan dengan adanya program ini, kita berharap perguruan tinggi membuka prodi pendidikan PJOK, karena tidak semua perguruan tinggi itu memiliki prodi tersebut.

Kami juga merespon baik adanya kebijakan penataan guru. Kami berharap adanya koordinasi intensif dengan Ditjen GTK dengan dinas daerah atas himbauan untuk tidak memperbolehkan juga sekolah mengangkat honorer kembali ya, karena mulai tahun ajaran 2024-2025 seterusnya. Karena pengangkatan ini akan menjadi komunitas politik yang nanti akhirnya menjadi permasalahan pembayaran kepada mereka sebagaimana yang kita hadapkan selama ini.

Kemudian, terkait usulan rekomendasi Kemendikbudristek dalam upaya penuntasan ASN PPPK, kami berharap koordinasi juga dengan KemenPan-RB, Kemendagri secara intensif agar kesediaan formasi serta status kepada mereka. Karena ini janji dengan lahirnya Undang-Undang ASN kemarin per Desember 2024 akan diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Dalam program vokasi juga, kami melihat tahun 2025 terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, maka titik tekan pada dunia usaha dan dunia industri secara mitra harus diperjelas dengan keberadaannya, keterlibatannya, dan keberpihakannya pemerintah daerah harus dipertegas sebagaimana bagian dari posisi tawar pemerintah daerah dengan dunia pendidikan, khususnya vokasi.

Kemudian juga penguatan SMK pusat program Ditjen GTK, kami membaca ada pengembangan karir, penghargaan guru serta penyusunan kebijakan pendataan guru di daerah. Kami sangat mengapresiasi, mengingat bahwa kebijakan ini diarahkan untuk memanusiaikan guru.

Nah, jadi memang apa yang telah kita bahas selama berapa hari ini, mungkin paling panjang memang Kemendikbudristek ini, tentu harapan kami program-program yang sudah baik terus dilanjutkan dan kemudian banyak hal mungkin yang dalam perjalanan selama kebersamaan kita di sini, kadang-kadang ada yang mungkin kebijakan-kebijakan yang diambil itu tanpa juga sepengetahuan kami, mungkin ke depan komunikasi-koordinasi kita menjadi lebih baik ke depan.

Dan dalam transisi pemerintahan tahun ini harapan kita program prioritas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu kami Fraksi PPP mengucapkan apresiasi terima kasih atas program-program, kerja sama-selama ini yang sudah cukup baik terhadap program PIP, KIP Kuliah. Tapi memang ada harapan, ke depan itu KIP Kuliah itu juga bisa diberikan kepada anak-anak yang berprestasi yang memang mereka mungkin tidak tergolong miskin, tapi juga mereka menengah ke bawah yang berprestasi tapi tidak mendapatkan juga kesempatan untuk mendapatkan KIP Kuliah. Mudah-mudahan ke depan ada perhatian dan bisa dianggarkan untuk itu.

Dan terakhir, kami Fraksi PPP menyetujui pagu anggaran 2025 sebanyak 83,19 triliun dengan usulan tambahan 25 triliun. Harapan kami, pendidikan Indonesia dapat menjadi pendidikan harapan bagi semua masyarakat Indonesia dan 2045 Indonesia Emas bisa diwujudkan.

Terima kasih.

*Wafahmikum wastaghfirlakum,
Wassalamualikum warahmatullah wabarakatuh*

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Bu Iliza dari Fraksi PPP yang sudah menyampaikan pandangan akhirnya berikut catatannya.

Bapak-Ibu sekalian, saya perpanjang 15 menit,

(RAPAT: SETUJU)

f

Sebelum saya serahkan kepada Mas Menteri dan nanti langsung kita lapsing, karena waktu kebetulan Mas Menaker eh Menaker, Menparekraf sudah hadir, sudah hadir Mas Sandiaga Uno-nya. Jadi, mungkin bisa kita percepat semua pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman melalui catatan tadi. Mohon nanti bisa dijawab secara tertulis, sekiranya ada yang ingin direspon cepat sekarang mungkin bisa direspon. Selebihnya, nanti habis ini langsung kita membacakan lapsing.

Kami persilakan, Mas menteri.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Kami setuju, Bapak Pimpinan. Untuk menjawab pertanyaan beberapa tadi melalui tertulis saja.

Mungkin demikian dari kami bisa dilanjutkan ke kesimpulannya untuk saat ini, tapi terima kasih untuk persetujuannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

Terima kasih, Mas menteri.

Bu Sekjen, cukup? Mau langsung lapsing?

Oke.

F-DEMOKRAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol):

Tambahan-tambahan 25 triliun tapi sudah disampaikan?

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

Sudah.

Terkait dengan penambahan tadi, prinsipnya tadi kami setelah Bu Sekjen membacakan usulan tambahan, kami anggap itu sudah disampaikan dalam rapat kerja hari ini.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.):

Pak, sudah dibahas juga di dalam RDP kemarin.

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

Oke, iya.

f

Bisa ditampilkan, lappingnya saya baca dulu sebagai draf, nanti akan kita koreksi bersama-sama ketika ada kekurangan atau penambahan redaksi.

Saya langsung pada:

II. Kesimpulan/Keputusan:

1. Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Kemendikbudristek RI pada RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp83.187.821.056.000 dengan rincian per unit utama dan per program sebagai berikut.

Izin saya tidak bacakan untuk bisa kita lihat Bu Sekjen, Pak Dirjen, mungkin ada angka yang kurang pas bisa langsung dikoreksi.

2. Komisi X DPR RI akan menyampaikan usulan pagu indikatif Kemendikbudristek RI pada RAPBN tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada angka II.1 ke Badan Anggaran DPR RI.
3. Komisi X mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp25.013.159.081.000 ke Badan Anggaran DPR RI dengan catatan perlu dilakukan pendalaman secara khusus mengenai rincian program dan anggarannya.
4. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI bahwa pembahasan lebih rinci akan dibahas setelah terbitnya nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025. Pandangan dan masukan Komisi X DPR RI dalam rapat kerja tanggal 5 Juni dan RDP tanggal 10 sampai 12 Juni menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Kemendikbudristek RI pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Bu Sekjen, cukup?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.):

Cukup.

KETUA RAPAT (H. SYAIFUL HUDA/KETUA KOMISI X DPR RI):

Nah, teman-teman cukup? Iya pas? Oke.

Mas Menteri, kita ketok palu, Mas.

(RAPAT: SETUJU)

Tepuk tangan berarti, tepuk tangan.

Terima kasih Ibu Bu Sekjen ini yang sudah mengawal semua Dirjen, Pak Kepala dan semuanya.

Terima kasih Mas Menteri, seluruh pejabat kepala pusat, dan seterusnya.

f

Terima kasih yang hadir, Eselon II, Eselon III yang hadir. Terima kasih atas kesempatan raker pada siang hari ini.

Langsung saya tutup Mas, ya.

Dengan membaca *alhamdulillah*, saya tutup raker pada kesempatan kali ini.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.08 WIB)

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

a.n **KETUA RAPAT,
SEKRETARIS RAPAT,**

ttd.

DADANG PRAYITNA,S.IP,M.H
NIP. 196708061990031003